

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sektor pariwisata merupakan fokus pemerintah yang ada sejak dahulu hingga sampai sekarang. Definisi pariwisata menurut *World Tourism Organization (WTO)* adalah “*the activities of person travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes*”. (Muljadi & Andri, Kepariwisata dan Perjalanan, 2014). Pariwisata adalah aktivitas perjalanan seseorang menuju dan tinggal diluar lingkungan biasa mereka selama tidak lebih dari setahun untuk bersantai, bisnis dan tujuan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan di perlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan kehidupan lokal, nasional dan global. Dengan demikian seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Pengembangan sektor pariwisata menjadi industri terkuat dan terbesar dalam pembiayaan ekonomi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) untuk menunjang otonomi suatu daerah, bahkan dari sektor pariwisata juga menjadi devisa yang besar bagi berbagai Negara (Hasanuddin & Sunarti, 2019). Kesejahteraan dan kemajuan sektor pariwisata yang seakin tinggi menjadikan pariwisata sebagian bagian pokok dari kebutuhan hidup manusia atau kebutuhan dan dapat menggerakkan jutaan orang untuk mengenal budaya dan alam ke kawasan-kawasan atau belahan dunia lainnya sehingga dari pergerakan jutaan manusia dapat menggerakkan suatu mata rantai ekonomi yang saling berkaitan sehingga menjadi suatu industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian bangsa-bangsa, perekonomian dunia, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal (Atter & dkk, 2013).

Wahab berpendapat bahwa pariwisata merupakan salah satu industri baru yang bisa memberikan hasil untuk meningkatkan perekonomian yang sangat cepat dalam menyediakan peningkatan penghasilan, standar hidup, dan lapangan pekerjaan serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Dampak dari pariwisata pada masyarakat diantaranya yaitu dampak lingkungan, dampak social budaya dan dampak ekonomi. Dari segi ekonomi terdapat dampak langsung yang dirasakan masyarakat yaitu bagi pekerja di kawasan wisata termasuk pemerintah daerah sedangkan dampak tidak langsung yaitu meningkatkan permintaan transportasi umum publik serta dampak berkelanjutan yang berhubungan di bidang pariwisata yang berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat (Kharisma, 2013).

Salah satu sektor pariwisata yang berkembang di Indonesia adalah wisata Telaga Sarangan yang berada di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan yang berada di lereng gunung lawu merupakan objek wisata pemerintah kabupaten setempat dalam satu tahun dikunjungi lebih dari 700 ribu wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia sehingga menghasilkan Pendapatan Asli Daerah PAD hingga milyaran rupiah dari pariwisata. Berdasarkan data dari dinas pariwisata setempat, PAD Telaga Sarangan tahun 2019 mencapai 15,7 Milyar hingga pertengahan Desember 2019 mencapai 94% pihaknya menyakini bahwa target PAD Telaga Sarangan yang telah ditetapkan bisa tercapai karena objek wisata ramai dikunjungi wisatawan.

Pelayanan sektor pariwisata di Indonesia saat ini belum memuaskan. Pelayanan publik dibidang pariwisata mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.pelayanan pariwisata merupakan pelayan publik yang menjadi hak warga negara dimana pelayanan tersebut bisa menyentuh semua kalangan termasuk wisatawan yang masuk dalam kategori difabel.Pada kenyataan banyak tempat wisata yang belum menyediakan fasilitas yang reperentative untuk semua kalangan.penyediaan fasilitas pelayanan publik masih jauh dari harapan. (Zakiyah, Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas, 2016).

Dewasa ini yang sering terjadi dilapangan masih banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait penyedian fasilitas dan sarana publik yang belum bisa memenuhi kebutuhan difabel di Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Difabel menjelaskan bahwa

“Difabel adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda, istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. (Rahayu, Dewi, & Ahdiyana, 2013)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang belum optimal dalam menerapkan model pariwisata yang ramah terhadap penyandang disabilitas padahal setiap orang pasti mempunyai kesamaan hak untuk melakukan pariwisata tanpa pandang bulu tidak mengenal kaya atau miskin, tua atau muda, sakit atau sehat, dan manusia yang normal atau yang difabel semua orang mempunyai kesamaan hak dan kesempatan dalam berwisata. Selama ini konsep pariwisata hanya dirancang untuk orang-orang yang normal saja tanpa mempedulikan hak bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Apakah mereka tidak layak dan tidak boleh berwisata, tidak boleh mengunjungi tempat-tempat yang indah dan mempunyai nilai sejarah tinggi, yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang normal biasanya lakukan ketika mereka mempunyai waktu luang, berlibur, atau sekedar melepas kepenatan dari aktivitas sehari-hari. Demi memudahkan Difabel dalam melakukan

pariwisata atau kunjungan maka harus dibuat sebuah konsep pariwisata yang ramah terhadap kaum Difabel.

Konsep pariwisata yang ramah terhadap Difabel ini misalnya setiap tempat atau obyek daya tarik wisata menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas yang memang diperlukan oleh wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik misalnya menyediakan alat komunikasi khusus bagi wisatawan yang tuna rungu, menyediakan kursi roda untuk yang tidak bisa berjalan, dan sarana penunjang lainnya. (Zakiyah, 2016)

Saat ini masih banyak terjadi masalah-masalah yang dapat memenuhi kebutuhan difabel terkait penyediaan fasilitas dan sarana publik yang akan berpengaruh terhadap pariwisata karena selama ini konsep pariwisata hanya dirancang hanya untuk orang normal saja tanpa memperhatikan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus atau difabel.

Telaga Sarangan merupakan destinasi wisata terbesar dan paling ramai dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Magetan. Fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di Telaga Sarangan seharusnya menjadi panutan dan acuan lokasi wisata lain yang berada di Magetan terutama fasilitas-fasilitas khusus difabel karena kenyamanan para wisatawan merupakan hal utama yang harus dipikirkan oleh pengelola tempat wisata. Sebaiknya pemerintah membuat konsep pariwisata seperti menyediakan berbagai fasilitas dan aksesbititas khusus bagi yang memiliki keterbatasan fisik seperti alat komunikasi bagi tuna rungu dan kursi roda bagi yang membutuhkan. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana evaluasi mengenai fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan.

Jumlah Pengunjung Telaga Sarangan

No	Bulan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Januari	174,059	74,065	140,461
2	Februari	43,056	42,096	43,661
3	Maret	46,927	41,485	36,575
4	April	51,445	67,229	63,315
5	Mei	58,708	41,049	24,044
6	Juni	100,360	150,025	171,295
7	Juli	199,604	89,834	106,604
8	Agustus	45,494	52,263	49,690
9	September	58,590	58,590	56,237
10	Oktober	61,793	61,793	53,714
11	November	48,804	48,804	*
12	Desember	122,191	122,191	*
	Jumlah	1,011,031	849,424	745,596

B. Rumusan Masalah

Bagaimana evaluasi sarana dan prasarana obyek wisata bagi difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui evaluasi sarana dan prasarana obyek wisata bagi difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi pencapaian sarana dan prasarana pemerintah di Telaga Sarangan pada tahun 2019.
- b. Mengidentifikasi pengembangan wisata di Telaga Sarangan pada tahun 2019.
- c. Menganalisis akses fasilitas difabel di Telaga Sarangan pada tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan wisata telaga sarangan khususnya bagi fasilitas untuk difabel bagi mahasiswa maupun publik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan wawasan mengenai evaluasi sarana dan prasarana obyek wisata bagi difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat terutama penduduk Sarangan diharapkan mampu mengukur evaluasi sarana dan prasarana obyek wisata bagi difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan materi baru dalam evaluasi sarana dan prasarana obyek wisata bagi difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019.

E. Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

Beberapa penellitian terdahulu yang menjadi dasar penelitian ini/ Blue Print pada tabel 1.1 dibawah ini:

No	Judul	Penulis dan Tahun	Teori sebelum penelitian	Hasil
1.	Accessible (<i>Accessibility for Disability</i>): Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Fasilitas Umum bagi Difabel Berbasis <i>WebGIS</i> untuk Mendukung Pembangunan <i>Inklusif</i> Ramah <i>Disabilitas</i> di Daerah Istimewa Yogyakarta	Lutfiana Pasebhan Jati (2019)	Penelitian ini tidak menyebutkan teori yang digunakan sebelum penelitian.	Hasil penelitian ini adalah sistem informasi terkait lokasi pelayanan fasilitas umum bagi difabel yang ada belum mampu memberikan informasi untuk akurat dan lengkap secara cepat. Hal ini disebabkan lambatnya pengumpulan, pengolahan distribusi data antar instansi, karena sebagian besar masih dilakukan manual. Dengan kemajuan teknologi informasi terutama internet, <i>WebGIS Accessible</i> mampu memberikan informasi mengenai lokasi fasilitas umum dan pariwisata yang ramah disabilitas di Daerah istimewa Yogyakarta, melibatkan masyarakat lokal (<i>e-participation</i>) pada fitur <i>facilities report</i> . <i>WebGIS</i> sistem informasi <i>Accessible</i> berfungsi untuk memperoleh lokasi serta

				informasi mengenai lokasi fasilitas umum ramah disabilitas melalui website interaktif serta diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai fasilitas umum untuk penyandang disabilitas.
2.	Pariwisata Ramah Disabilitas	Deby Rahmadanti (2018)	Penelitian ini tidak menyebutkan teori yang digunakan sebelum penelitian. Fokus penelitian ini untuk mengetahui penyediaan layanan bagi penyandang difabel di Museum Negeri Mpu Tantular.	Sebagaimana penulis tertarik dengan penelitian ini karena adanya wisatawan yang secara fisik dan psikis memiliki perbedaan yang beragam. Adapun penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yakni dengan mengumpulkan data berupa gambar, tanpa adanya angka-angka dan berupa kata-kata, memaparkan dan menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian pada saat mengadakan penelitian berlangsung. Hasil dari penelitian tersebut telah memberikan gambaran bahwa Museum Negeri Mpu Tantular sudah menyediakan layanan bagi wisatawan difabel secara fisik dan non fisik. Pemberian pelayanan secara fisik yang sudah diberikan adalah handrail di dalam gedung, gedung tuna netra dengan fasilitas di dalamnya berupa penjelasan brailer serta telah disediakan juga handrail area untuk memasuki gedung. Selain

				<p>sudah di berikan layanan secara fisik, Museum Negri Mpu Tantular juga telah memberikan layanan secara non fisik berupa pemandu di area museum, adanya penyambutan dari pintu gerbang masuk, sehingga dengan adanya bantuan pendampingan tersebut maka wisatawan difabel mendapatkan pelayanan seperti ini di nilai belum ada permasalahan dan di nilai berkerja dengan baik.</p>
3.	<p>Evaluasi Program - Program Strategis Pemerintah Kota Bandung Di Bidang Ekonomi dalam Upaya Penguatan dan Peningkatan Kemampuan Daya Beli Masyarakat : Suatu Tinjauan Analisis Kebijakan Publik</p>	<p>Bayu Kharisma (2013)</p>	<p>Penelitian ini tidak menyebutkan teori yang digunakan sebelum penelitian.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa langkah atau upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mengevaluasi kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam berbagai bentuk program dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat Kota Bandung. Langkah pertama, melihat potensi dan permasalahan dengan menggunakan analisis SWOT (<i>strengths, weaknesses, opportunities, threats</i>). Langkah kedua, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung yang berkaitan dengan program-program peningkatan daya beli masyarakat. Langkah</p>

				ketiga, untuk melakukan evaluasi kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam berbagai program dilakukan analisis AHP dan menghubungkannya dengan indikator makroekonomi daerah (<i>regional macroeconomic indicator</i>).
4.	Evaluasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017 (Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan)	Desy Maryati (2018)	Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori model evaluasi CIPP (Contexts, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam (1973:127) dalam Tayibnafis (2008:14)	Hasil dari penelitian ini adalah penulis menggunakan teknik analisa CIPP menunjukkan bahwa tujuan program tersebut sudah tercapai dan berhasil karena variable konteks sudah baik dapat dilihat dari latar belakang program, sehingga di laksanakannya suatu program destinasi pariwisata karena ada kebutuhan yang mendasaryaitu kelemahan dan kekuatan yang harus terpenuhi. Sementara itu dalam pelaksanaan program pengembangan destinasi wisata dapat dikatakan masih belum optimal, disebabkan masih terdapat keterbatasan sumberdaya yang ada, utamanya sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan untuk variable proses dapat dikatakan sudah tercapai dari semua kegiatan pada tahun 2017 berjalan lancar

				dengan pencapaian hamper 100%, terdapat salah satu kegiatan tersebut dalam pemanfaatannya belum maksimal sehingga diperlukan perhatian dan pengawasan dari pengelola dan pemerintah kota.
5.	Penyediaan Aksesibilitas bagi Wisatawan Difabel oleh Stakeholder di Kota Madya Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan.	Carolina Simanjuntak, Luh Gede Leli Kusuma Dewi, Ni Gusti Ayu Susrami Dewi. (2018)	Merujuk pada tema World Tourism Day 2016 yang bertajuk Tourism For All, United Nations World Tourism Organization atau yang lebih sering disebut UNWTO ingin agar dunia kepariwisataan dapat di nikmati oleh siapa saja tanpa terkecuali.	Sebagaimana dari hasil penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa untuk penyediaan aksesibilitas bagi wisatawan difabel oleh stakeolder pariwisata di Kota Madya Denpasar Kecamatan Denpasar Selatan masih belum seluruhnya tersedia, penyediaan aksesibilitas secara fisik yang sudah tersedia adalah pintu geser dan ram, selain itu juga terdapat aksesibilitas non fisik yaitu terdapatnya peraturan yang mengatur tentang aktivitas wisatawan dan tersedianya pelayanan khusus bagi difabel. Selain pelayanan yang sudah tersedia baik itu secara fisik dan non fisik, terdaat juga kendala stakeholder dalam menghadapi terkait penyediaan aksesbelitas bagi difabel yaitu belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang wisatawan yang cacat, keterbatasan anggaran, kendala internal dan

				eksternal.
6.	Analisis Fasilitas Pariwisata di Museum Angkut Kota Batu bagi Pengunjung Difabel	Muhammad Hasanuddin Sunarti (2019)	Penyediaan fasilitas difabel amanat dari UU RI Nomor 8 pasal 1 tahun 2016.	Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis bahwa sudah tersedia bagi pengunjung difabel terdapat dua fasilitas yang sudah memenuhi criteria fasilitas secara inklusif, namun masih terdapat 19 fasilitas pariwisata lainnya yang masih belum memenuhi fasilitas inklusif sesuai kriteria yang tersedia. Terdapat juga factor pendukung yang relevan didalam visi Museum Angkut sehingga dengan adanya peraturan daerah tentang kemudahan yang dapat di akses dalam sebuah gedung bagi difabel. Sedangkan factor penghambat dalam pelayanan terkait fasilitas yang tersedia di Museun Angkut Batu bagi difabel yaitu belum tersedianya pendataan wisatawan bagi pengunjung difabel dan belum terdapat pelatihan khusus bagi karyawan mengenai pelayanan bagi pengunjung difabel dari Dinas Pariwisata Kota Batu.
7.	Evaluasi Program Asistensi Social Difabel Berat (ASPDB) di Kota	Yuyun Fitriani (2016)	Penelitian ini tidak menyebutkan teori yang	Hasil penelitian berdasarkan 6 kriteria evaluasi kebijakan yang digunakan penulis dalam

	Bandar Lampung		digunakan penelitian.	sebelum penelitian tersebut terdapat 3 diantaranya yang sudah berhasil/tercapai dengan baik, yaitu pada kriteria pemerataan, responsivitas dan efisiensi karena dalam pendistribusian program ASPDB sudah tepat sasaran dan implementasi program ASPDB sumberdaya yang dilakukan sudah maksimal serta kelompok sesuai sasaran program tersebut sudah merasakan kepuasan adayan program ASPDB. Sedangkan 3 kriteria yang selanjutnya yaitu kecakupan, ketepatan dan efektifitas dinilai belum tercapai dengan baik disebabkan karena tidak semua tujuan dari program tersebut dapat tercapai,dan juga hasil dari tujuan program tersebut belum mampu memecahkan permasalahan terhadap kesejahteraan disabilitas dan perwatan. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program ASPDB tersebut yakni masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bndar Lmapung, masih banyak juga keluarga difabel yang menutupi bahwa mereka memiiki keluarga yang mengalami serta keterbatasan anggaran pelaksanaan
--	----------------	--	--------------------------	---

				program ASPDB.
8.	Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Difabel di Kabupaten Buleleng	Ni Nyoman Puspa Adnyanidan I Nyoman Surata (2018)	Penelitian ini tidak menyebutkan teori yang digunakan sebelum penelitian.	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Difabel. Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini meneliti tentang peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel di Kabupaten Buleleng dan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng.

9.	Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta(Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan)	Rina Herlina Haryanti, Candra Sari	Penelitian ini tidak menyebutkan teori yang digunakan sebelum penelitian.	Fasilitas yang dilihat dan dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan tersebut yakni ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, ramp, serta rambu dan marka.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan fasilitas dan sarana yang ada di lokasi wisata yakni Taman Balekambang, Taman Satwa Taru Jurug dan Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari belum lengkap dan sesuai dengan kebijakan. Ketidaklengkapan fasilitas ini menunjukkan bahwa lokasi wisata yang ada tidak aksesibel bagi difabel.Ini menjadikan aksesibilitas pariwisata yang ada di Surakarta belum terwujud.
10.	Pariwisata Ramah Difabel	Ummi Zakiyah, Rahmawati Husein (2016)	Tori Sen (2007) yang mengemukakan bahwa ada tiga kebutuhan difabel dalam berwisata yaitu: tersedianya aksesibilitas, transportasi dan	Hasil penelitian menemukan bahwa fasilitas dan aksesibilitas pariwisata untuk difabel masih sangat kurang, belum ada peraturan yang mengharuskan tempat wisata menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang

			akomodasi	ramah untuk difabel.Sumberdaya anggaran dan sumberdaya manusia juga masih terbatas bagi pengelola wisata untuk mengembangkan tempat wisata yang ramah difabel. Dengan demikian hasil penelitian ini merekomendasikan untuk membuat kebijakan pariwisata yang ramah untuk difabel, dan menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi difabel.
--	--	--	-----------	---

F. Kerangka Teori

1. Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi

Evaluasi dapat digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kebijakan publik yang berorientasi kepada tujuan dan target kebijakan. Tahapan evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting di dalam proses kebijakan publik. Evaluasi dapat diartikan sebagai penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*Rating*), dan penilaian (*Assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya (Dunn, 2003). Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut, bahkan evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat, atau diakhiri (Paskarina, 2007).

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat diperoleh kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui ukuran, identifikasi, dan nilai dari keseluruhan tahapan kebijakan publik.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batas waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak. Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang telah panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relative lebih cepat semenjak di terapkannya kebijakan yang bersangkutan. (Surwantoro, 2004)

Evaluasi adalah Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Evaluasi dapat memberikan informasi tidak hanya mengenai perkembangan input dan output pelaksanaan program, tetapi juga meliputi hasil, manfaat dan dampak serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan potensi pariwisata. Evaluasi dapat dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program untuk mengukur indikator-indikator, yaitu; menentukan apakah tujuan

umum dan tujuan khusus program telah tercapai, menentukan apakah terdapat manfaat dari program dan menentukan suksesan keseluruhan pelaksanaan program.(Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, 2012).

b. Sifat Evaluasi

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan keseluruhan kinerja dari kebijakan, khususnya pada proses implementasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lain. Beberapa karakteristik kebijakan yang membedakannya menurut Dunn:

1) *Value Focus* (Fokus Nilai)

Evaluasi memiliki perbedaan dengan pemantauan dimana evaluasi difokuskan pada penilaian keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi merupakan usaha yang bertujuan untuk mengetahui manfaat kebijakan atau program sosial yang telah dibentuk. Ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan serta mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) *Fact-value Interdependence* (Interdependensi Fakta-nilai)

Evaluasi bergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa suatu kinerja kebijakan atau program telah mencapai keberhasilan atau kegagalan. Hal ini didukung dengan hasil

kebijakan yang sesungguhnya dan sebagai akibat dari segala aktivitas kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.

3) *Present and Past Orientation* (Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau)

Evaluasi memiliki perbedaan dengan advokatif, yang mengacu pada masa sekarang dan hasil di masa lalu, bukan dari hasil masa yang akan datang. Evaluasi bersifat retrospektif yang dilakukan setelah tindakan (*ex-post*). Evaluasi juga bersifat prospektif yang dibuat dilakukannya tindakan (*ex-ante*).

4) *Value Duality* (Dualitas Nilai)

Evaluasi mempunyai nilai turunan yang berkualitas ganda, karena memiliki nilai dasar yang dianggap sebagai tujuan dan cara. Evaluasi dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan untuk dirinya) ataupun ekstristik (diperlukan untuk tujuan lainnya). Nilai sering disusun menjadi sebuah tingkatan yang menggambarkan kepentingan.

c. Fungsi Evaluasi

Evaluasi memiliki fungsi utama dalam sebuah analisis kebijakan yaitu dalam pelaksanaan suatu program, apabila evaluasi dijalankan dengan benar maka akan menghasilkan manfaat baik. Menurut Dunn, (2003:609-611) fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan yakni:

- 1) Evaluasi memberikan informasi yang dapat dipercaya dan terbukti mengenai sebuah kebijakan yang dijalankan.

- 2) Evaluasi dapat mengklarifikasi dan memberikan kritik terhadap tujuan dan target kebijakan. Evaluasi juga dapat memverifikasi alternatif sumber nilai maupun landasan yang digunakan.
- 3) Evaluasi dapat menjadi metode analisis sebuah kebijakan, contohnya evaluasi dapat menunjukkan tujuan serta target yang perlu dilakukan penjelasan atau pengkajian ulang, juga dapat mempertegas alternatif kebijakan yang baru atau pembaruan kebijakan.

Adapun Wibawa, Purbokusumo & Pramusinto (dalam Nugroho, 2003:609-611) juga menjelaskan bahwa ada empat fungsi dari evaluasi kebijakan publik, yaitu:

- 1) *Eksplanasi*. Evaluasi dapat direpresentasikan menjadi realitas pelaksanaan program dan pola hubungan antara harapan dan realitas. Dengan evaluasi ini, evaluator dapat mengetahui kondisi masalah dan aktor-aktor yang terlibat dalam keberhasilan maupun kegagalan dari sebuah kebijakan.
- 2) *Kepatuhan*. Evaluasi dapat mengetahui apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai standar dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh kebijakan.
- 3) *Audit*. Evaluasi dapat mengetahui hasil yang dicapai telah tepat sasaran atau mengalami kendala.
- 4) *Perhitungan*. Evaluasi dapat memperhitungkan apa akibat dari sebuah kebijakan dari segi sosial-ekonomi.

d. Indikator Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan penilaian kebijakan perlu ditentukan melalui beberapa indikator agar dapat menilai secara keseluruhan hasil dari kebijakan tersebut. Menurut Dunn, (2014:324) terdapat enam indikator evaluasi kebijakan, yaitu *Effectiveness* (Efektivitas), *Efficiency* (Efisiensi), *Adequacy* (Kecukupan), *Equality* (Perataan), *Responsiveness* (Responsivitas), dan *Appropriateness* (Ketepatan). Enam indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn dijelaskan kembali oleh Winarno, (2002:184-189) yaitu:

1) *Effectiveness* (Efektivitas)

Kata efektivitas berarti telah dicapainya keberhasilan tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil realitas. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan apabila dapat mengatasi permasalahan, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut berhasil, namun jika suatu kebijakan tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan, maka kebijakan tersebut telah gagal. Efektivitas suatu kebijakan tidak dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu yang pendek.

2) *Efficiency* (Efisiensi)

Efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang dilakukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu, umumnya diukur dari segi biaya. Apabila sasaran kebijakan publik menghabiskan biaya

yang lebih besar dibandingkan dengan hasil kebijakan, maka dapat dikatakan kebijakan tersebut tidak efisien.

3) *Adequacy* (Kecukupan)

Kecukupan dalam suatu kebijakan publik diukur melalui seberapa jauh tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan nilai atau kesempatan dalam sebuah masalah. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu kebijakan disahkan, harus dilakukan analisis kesesuaian metode dengan sasaran yang ingin dicapai.

4) *Equality* (Perataan)

Perataan memiliki arti keadilan yang diberikan atau diperoleh dari kebijakan publik. Pelaksanaan kebijakan publik wajib memiliki sifat adil dalam semua sektor dan lapisan masyarakat dapat merasakan hasil dari kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5) *Responsiveness* (Responsivitas)

Responsivitas diartikan sebagai respon dari masyarakat atas suatu aktivitas, hal ini berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memenuhi kebutuhan referensi atau nilai dari kelompok masyarakat. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut dengan syarat masyarakat sudah memiliki prediksi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Responsivitas menjadi gambaran dari empat indikator evaluasi kebijakan sebelumnya yakni berupa dukungan maupun penolakan terhadap sebuah kebijakan.

6) *Appropriateness* (Ketepatan)

Ketepatan mengacu pada nilai atau harga dari tujuan program dan asumsi yang melandasi tujuan tersebut. Indikator ini dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena menyangkut pada tujuan, bukan kepada cara atau instrumen yang digunakan untuk pencapaian tujuan tersebut. Ketepatan juga merujuk pada nilai atau harga dari tujuan kebijakan terhadap pernyataan yang mendasari tujuan tersebut.

e. **Pengertian Program**

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Secara umum program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan maka program merupakan suatu sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan (Sari, Sambiran, & Kairupan, 2017). Pelaksanaan program selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok orang. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Semua program perlu dievaluasi untuk

menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Sedangkan evaluator adalah orang yang melakukan evaluasi. Banyak kriteria, jenis atau model evaluasi yang dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program. Evert Vedung mengemukakan empat kriteria dalam evaluasi program sebagai berikut: (Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, 2012)

- 1) Efektif
- 2) Produktivitas
- 3) Efisiensi (cost-benefit)
- 4) Efisiensi (cost-effectiveness)

2. Pengembangan Pariwisata

a. Pengertian Pengembangan Pariwisata

Definisi pariwisata menurut World Tourism Organization (WTO) adalah “the activities of person travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes”. Pariwisata adalah aktivitas perjalanan seseorang menuju dan tinggal diluar lingkungan biasa mereka selama tidak lebih dari setahun untuk bersantai, bisnis dan tujuan lainnya. (Muljadi & Andr, Kepariwisata dan Perjalanan, 2014)

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah” (Hassanudin & Sunarti). Strategi pengembangan pariwisata merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas sumber daya alam. (Happy & Bahar, 2002)

Perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Pariwisata dapat memberikan kehidupan yang standar kepada warga setempat melalui keuntungan ekonomi yang didapat dari tujuan wisata. Dalam perkembangan infrastruktur dan fasilitas rekreasi, keduanya menguntungkan wisatawan dan warga setempat, sebaliknya kepariwisataan dikembangkan melalui penyediaan tujuan tempat wisata.

b. Tujuan Pengembangan Pariwisata

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang pariwisata pengembangan destinasi pariwisata mempunyai tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Menghapus kemiskinan.
- 4) Mengatasi pengangguran.

- 5) Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.
- 6) Memajukan kebudayaan.
- 7) Mengangkat citra bangsa.
- 8) Memupuk rasa cinta tanah air.
- 9) Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa.
- 10) Mempererat persahabatan antar bangsa.

3. Akses *Disabilitas*

a. Pengertian *Disabilitas*

Menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan *Disabilitas* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif (Rahayu d. , 2013).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Difabel disebutkan bahwa "*Difabel* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam UU No 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat telah diklasifikasikan guna mempermudah masyarakat dalam membedakannya, antara lain (Ramadhanti, 2018):

1) Cacat Fisik

a) Cacat Tubuh

Anggota tubuh yang tidak lengkap karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan.

b) Cacat Rungu Wicara

Kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun terdiri dari cacat rungu dan cacat wicara.

c) Cacat Netra

Seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang di sebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Terdiri dari buta total, persepsi cahaya dan memiliki sisa penglihatan (low vision).

2) Cacat Mental

a) Cacat Mental

Retardasi Seseorang yang perkembangan mentalnya tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya.

b) Eks Psikotik

Seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.

c) Cacat Fisik dan Mental

Seseorang yang memiliki kelainan fisik dan mental.

b. Penyediaan Fasilitas Bagi Difabel di Tempat Wisata

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 "Setiap bangunan harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk difabel, kecuali perumahan pribadi". Sehingga adanya fasilitas ini dapat menunjang pemenuhan kebutuhan setiap individu yang menggunakannya. Kebutuhan setiap orang akan berbeda-beda seperti halnya dalam penyediaannya juga. Fasilitas harus berfungsi dengan baik karena meskipun terdapat fasilitas yang cukup lengkap tetapi tidak dapat digunakan secara optimal, maka tidak akan memenuhi kebutuhan setiap individu.

Fasilitas merupakan sesuatu yang mempermudah kegiatan, karena segala sesuatu yang mendukung kegiatan sesuai fungsi dan kebutuhan untuk mempermudah suatu kegiatan atau pekerjaan dapat dikatakan sebagai fasilitas. Fasilitas juga dikatakan sebagai penunjang objek wisata, karena fasilitas merupakan faktor yang berguna menyeimbangkan atraksi wisata yang ada di suatu objek wisata. Standarisasi fasilitas yang ada di suatu objek wisata dapat menjadi tolak ukur kemajuan dan terawatnya objek tersebut. Ketersediaan fasilitas menjadi salah satu hal yang paling penting dalam mengukur standarisasi suatu tempat (Ramadhanti, 2018). Ketersediaan berasal dari kata dasar sedia, menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia Ketersediaan berarti Kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah di tentukan.

Fasilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. Ketersediaan fasilitas yang ada di objek wisata tentu harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Penyediaan fasilitas atau komponen pariwisata tentu berdasarkan pada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pengelola, hal ini akan mengacu pada nilai-nilai tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan pariwisata.

Fasilitas merupakan sarana umum yang harus dijaga bersama karena merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menggunakannya dan hak bagi semua orang untuk turut serta menggunakannya, serta harus dapat digunakan semua orang tanpa pandang bulu dan dibangun dengan memikirkan orang-orang yang hidup berdampingan dengan kita namun tidak memiliki fisik yang cukup lengkap. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan serta menikmati fasilitas yang sama tanpa melihat fisik atau hal-hallain. Fasilitas yang memadai sangat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan Setiap wisatawan yang berkunjung ke suatu objek wisata memiliki watak dan penampilan yang berbeda-beda, tidak menutup kemungkinan terdapat pula orang-orang yang memiliki keadaan fisik yang berbeda.

Setiap tempat atau objek wisata yang memiliki daya tarik wisata seharusnya juga menyediakan berbagai fasilitas dan aksesibilitas yang memang diperlukan oleh wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik. Ketersediaan pariwisata yang ramah terhadap difabel tentunya berhubungan dengan bagaimana memperbaiki kualitas pelayanan yang didalamnya terdapat faktor fasilitas ataupun aksesibilitas yang diberikan oleh para pelaku pariwisata di suatu objek wisata. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, difabel dalam Peraturan Pemerintah ini dijamin kesamaan hak, kewajiban dan perannya sesuai dengan kemampuannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada Pasal 6 yang berbunyi “Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksesibilitas. Kemudian dalam Pasal 8 tentang pembangunan publik yaitu “Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk penyandang difabel merupakan upaya pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas”. Segala hal yang telah diatur pemerintah untuk penyandang difabel merupakan upaya pemerintah guna menjaga hak mereka, sesuai dengan Pasal 9 yaitu “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan

yang lebih menunjang difabel agar dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat”.

Sebelum wisatawan berkunjung ke suatu objek wisata, wisatawan akan mencari tahu ketersediaan fasilitas dan infrastruktur apa saja yang telah tersedia. Beberapa fasilitas yang dapat disediakan objek wisata untuk mempermudah wisatawan difabel berkunjung, antara lain:

- 1) Area Parkir
- 2) Penyediaan Kursi Roda Di Objek Wisata
- 3) Penyediaan *Ramp*
- 4) Penyediaan Ubin Bertekstur (*Guiding Block*)
- 5) Penyediaan *Lift*

Untuk wisatawan difabel khususnya tuna daksa dan tuna netra infrastruktur jalan menjadi sangat penting untuk mendukung mobilitas mereka. Sebelum wisatawan berkunjung ke suatu objek wisata, wisatawan akan mencari tahu ketersediaan fasilitas dan infrastruktur apa saja yang telah tersedia. Beberapa fasilitas yang dapat disediakan objek wisata untuk mempermudah wisatawan difabel berkunjung, antara lain(Ramadhanti, 2018):

- 1) Area Parkir

Menurut ketentuan dari Keputusan Menteri PU No. 468 Tahun 1998 menentukan tempat parkir yang aksesibel bagi difabel, yaitu:

- a) Tempat parkir difabel terletak pada rute terdekat menuju bangunan atau fasilitas yang dituju dengan jarak maksimal 60 m.

- b) Jika tempat parkir tidak berhubungan langsung dengan bangunan, maka tempat parkir harus diletakkan sedekat mungkin dengan pintu masuk dan jalur pedestrian.
 - c) Area parkir harus mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga penggunaan kursi roda dapat mudah masuk dan keluar dari kendaraannya.
 - d) Area parkir khusus difabel dengan simbol parkir yang berlaku.
 - e) Ruang parkir lebar yang digunakan untuk kursi roda adalah 370 cm untuk parkir tunggal 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ramp dan jalan menuju fasilitas lain
- 2) Penyediaan Kursi Roda Di Objek Wisata

Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan kaki, baik oleh penyakit, trauma, dan cacat. Alat ini bisa digerakan dengan didorong oleh pihak lain, digerakan dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan mesin otomatis. Pemakaian awal kursi roda di Inggris pada tahun 1670-an, antara lain: Kursi roda manual Adalah kursi roda dengan tangan bagi penderita cacat, berupa kursi roda yang biasa digunakan untuk semua kegiatan. Kursi roda manual dapat dioperasikan dengan bantuan orang lain atau oleh penggunanya sendiri. Kursi roda seperti ini tidak dapat dioperasikan oleh penderita cacat yang memiliki kecacatan ditangan juga.

3) Penyediaan Ramp Bagi Difabel

Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu yang berfungsi untuk mempermudah difabel berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain yang tidak sama ketinggiannya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 468 Tahun 1998, yaitu:

- a) Dianjurkan kemiringan ramp yang ada di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° perhitungan ini tidak termasuk awalan atau akhiran ramp. Kemiringan ramp yang ada di luar bangunan maksimal 6° .
- b) Panjang mendatar dari satu ramp yang memiliki kemiringan 7° tidak boleh lebih dari 900cm.
- c) Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman.
- d) Muka datar pada awalan atau akhiran berukuran minimum 160 cm sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda.
- e) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur kasar sehingga tidak licin.
- f) Lebar tepi pengaman ramp 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar jalur ramp.

- g) Ramp harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan pada malam hari.
 - h) Ramp harus dilengkapi dengan pegangan (handrail) yang dijamin kekuatannya dan disesuaikan ketinggiannya.
- 4) Guiding Block
- a) Guiding Block merupakan insfrastruktur jalan mendasar yang diperlukan tuna netra untuk mobilitas mereka dalam menelusuri sebuah objek wisata. Persyaratan aksesibilitas jalur pemandu berdasarkan Permen PU Nomor 30 Tahun 2006 adalah: Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
 - b) Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/peringatan
 - c) Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (guiding blocks) yaitu: depan jalur lalu-lintas kendaraan, di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang, padapedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
 - d) Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin

eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.

- e) Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

5) Lift Bagi Difabel

Lift adalah alat elektrik yang berfungsi untuk membantu pergerakan secara vertikal di dalam bangunan. Lift dapat digunakan sebagai alternative alat sirkulasi vertikal bagi difabel. Menurut ketentuan dari Keputusan Menteri PU No. 468 Tahun 1998, yang aksesibel bagi difabel adalah:

- a) Untuk bangunan gedung lebih dari lima lantai harus menyediakan minimal satu buah lift yang aksesibel.
- b) Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift maksimum 1,25mm.
- c) Koridor atau ruang perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan lift, sekaligus menampung penumpang yang baru keluar lift harus disediakan dengan lebar minimal 185 cm.
- d) Ukuran bersih minimal ruang lift adalah 140 cm x 140 cm.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam

operasionalnya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain

1. Evaluasi Program

Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

2. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah terutama dari segi pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah terhadap fasilitas khusus difabel.

3. Akses disabilitas

Untuk melayani kebutuhan wisatawan yang beragam dan begitu kompleks maka diperlukan persediaan fasilitas pokok, fasilitas pendukung dan fasilitas pelengkap sebagai penunjang kegiatan berpariwisata.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah komponen-komponen penelitian yang berguna untuk membatasi variabel pengukuran untuk mencapai tujuan penelitian. Definisi operasional ini disusun untuk mengetahui evaluasi program

pemerintah dalam pengembangan pariwisata melalui akses khusus penyandang berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dibuat pada tabel 1.2

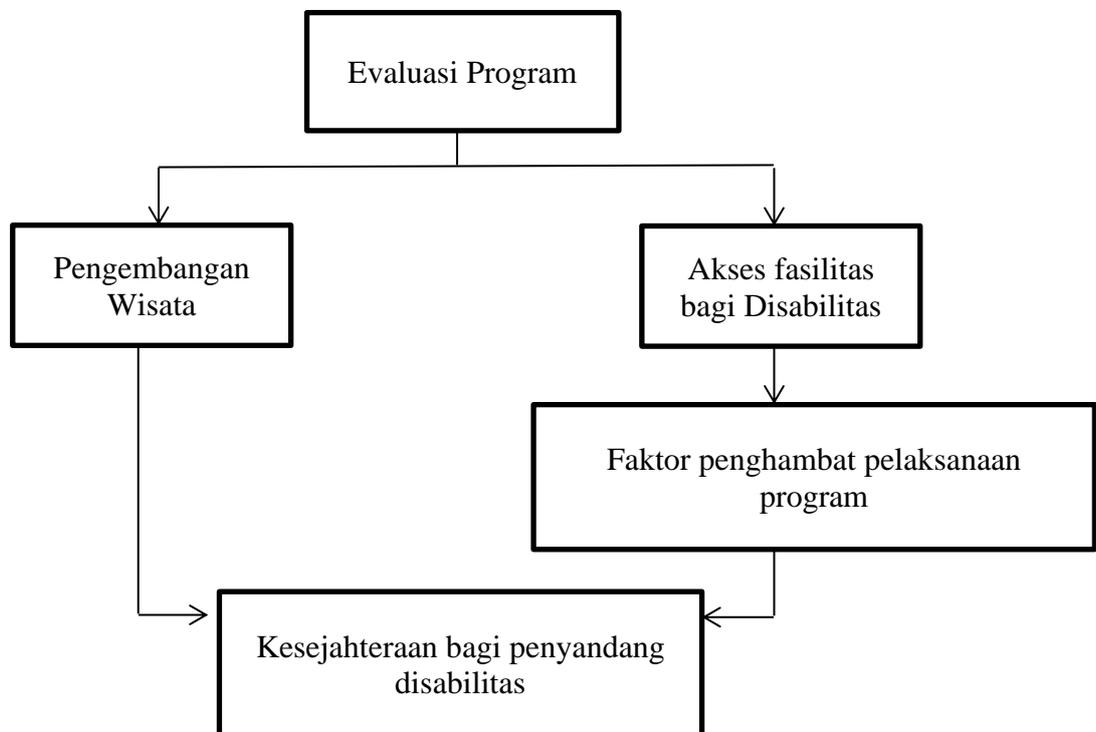
Tabel 1.2
Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter	Pokok-pokok Parameter untuk Pencarian Data
1.	Adanya Program	1. <i>Effectivity</i> (Efektifitas)	- Efektifitas program khusus bagi difabel. - Efektifitas perkembangan program pemerintah di Telaga Sarangan	1. Program yang diadakan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata telaga sarangan di tahun 2019. 2. Perkembangan program pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan pada tahun 2019. 3. Program khusus dari pemerintah bagi difabel di tahun 2019. 4. Perkembangan program khusus dari pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan sampai saat ini. 5. Latar belakang program khusus pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan.
		2. <i>Efficiency</i> (Efisiensi)	- Efisiensi program khusus bagi difabel	1. Program yang diadakan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata telaga sarangan di tahun 2019. 2. Perkembangan program pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan pada tahun 2019. 3. Program khusus dari pemerintah bagi difabel di tahun 2019. 4. Perkembangan program khusus dari pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan sampai saat ini. 5. Latar belakang program khusus pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan.
		3. <i>Adequacy</i> (Kecukupan)	- Kecukupan	1. Program yang diadakan pemerintah terhadap

			perkembangan program khusus bagi peyandang disabilitas	<p>pengembangan pariwisata telaga sarangan di tahun 2019.</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkembangan program pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan pada tahun 2019. Program khusus dari pemerintah bagi difabel di tahun 2019. Perkembangan program khusus dari pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan sampai saat ini. Latar belakang program khusus pemerintah bagi difabel di Telaga Sarangan.
2.	Kualitas Program	1. <i>Equality</i> (Pemerataan)	- Pemerataan informasi yang didapatkan oleh difabel	<ol style="list-style-type: none"> Informasi yang dapat di akses oleh difabel. <i>Turism center</i> yang ramah terhadap disabilitas. Kelebihan dan kelemahan dari program khusus bagi difabel di Telaga Sarangan.
		2. <i>Responsiveness</i> (Responsivitas)	- Responvisitas pemerintah terhadap difabel	<ol style="list-style-type: none"> Informasi mengenai program khusus yang didapatkan oleh difabel di Telaga Sarangan dari pemerintah. Respon difabel terhadap program khusus bagi difabel yang diberikan oleh pemerintah.
3.	Akses Disabilitas	1. <i>Appropriateness</i> (Ketepatan)	- Ketepatan program dan fasilitas bagi difabel	<ol style="list-style-type: none"> Fasilitas khusus bagi wisatawan difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan. Ketepatan pemberian fasilitas khusus hanya untuk wisatawan difabel di Telaga Sarangan.

I. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019 sebagai berikut :



Dari kerangka konsep diatas dapat dikemukakan bahwa evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019 salah satunya adalah ketersediaan akses fasilitas bagi difabel akan tetatapi di pariwisata telaga sarangan belum ada fasilitas tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel serta

faktor penghambat dalam akses fasilitas khusus difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019.

J. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan atau pemecahan suatu masalah pada dasarnya penggunaan metode ilmiah (S, 2012).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang menggunakan cara dengan mengumpulkan data berupa kata, gambar bukan berupa angka serta menguraikan suatu kejadian pada saat mengadakan penelitian dan membahas permasalahan saat penelitian berlangsung. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Atas dasar suatu hal penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan (Moleong & J, Metode Penelitian Kualitatif, 2014).

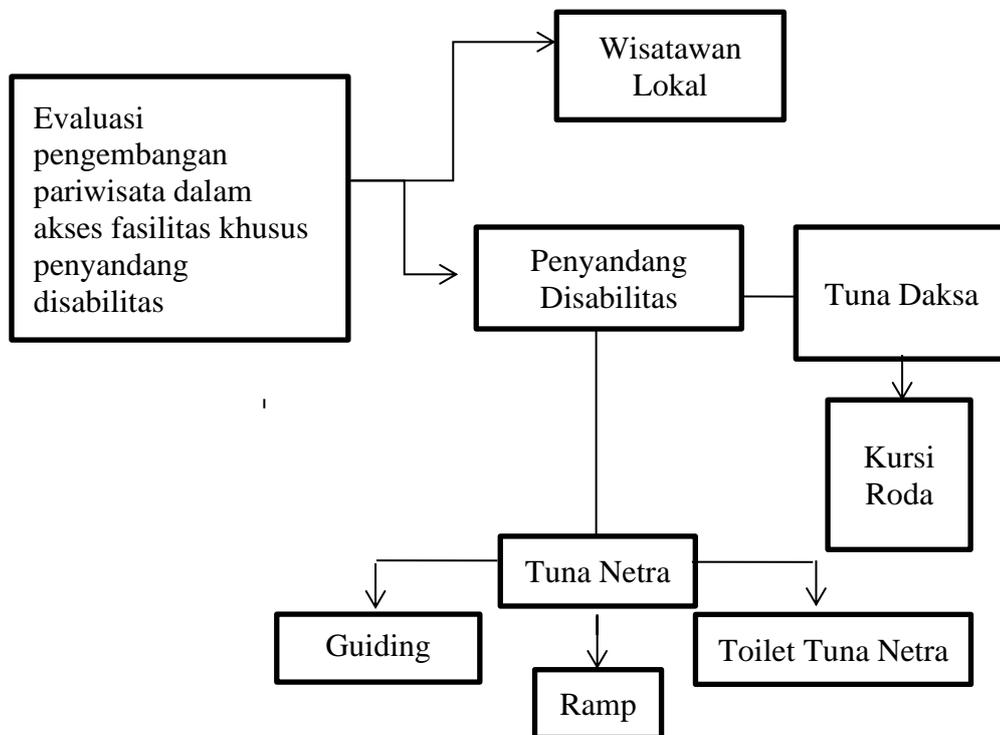
Dalam penelitian ini data diperoleh dari wawancara (*interview*), dan catatan lapangan dan dokumentasi dengan membuat keterangan secara urut berdasarkan data dari lapangan berupa kalimat tulis atau lisan dari subjek yang diamati mengenai evaluasi program pemerintah dalam pengembangan pariwisata melalui akses fasilitas khusus difabel di Wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Tepatnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan sebagai objek penelitian Telaga Sarangan yang menjadi fokus dalam mengevaluasi program pemerintah dalam pengembangan wisata melalui akses fasilitas difabel di wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan 2019. Lokasi ini menjadi pilihan peneliti karena belum terdapat fasilitas pendukung bagi difabel sasaran dari penelitian adalah difabel sehingga peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel dan menganalisis faktor penghambat dalam akses fasilitas khusus difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019 belum terdapat akses bagi difabel seperti tuna daksa yang memiliki kelainan atau cacat menetap pada alat gerak membutuhkan kursi roda atau transportasi lain bagi penyandang tuna daksa sedangkan dibutuhkan buat tuna daksa. Belum ada akses untuk difabel tuna netra seperti handrail, guiding block atau garis kuning trotoar, kamar mandi khusus tuna netra sedangkan dibutuhkan bagi tuna netra.

3. Unit Analisis

Unit analisis berisi tentang penegasan unit atau kesatuan yang akan menjadi subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan unit analisa yang digunakan yakni teknik purposive. Penggunaan teknik purposive saat sampel yang ajakan dituju dalam penelitian sebelumnya sudah ditentukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Unit analisis penelitian ini pada gambar dibawah ini:



Dari bagan unit analisis diatas peneliti mengemukakan bahwa wisatawan telaga sarangan terdiri dari wisatawan lokal dan wisatawan khusus yaitu bagi difabel, akan tetapi di wisata telaga sarangan tidak ada fasilitas khusus untuk difabel yaitu bagi tuna netra membutuhkan ramp, guiding blok, toilet khusus tuna netra dan bagi tuna daksa membutuhkan kursi roda. Akan tetapi di wisata telaga sarangan belum terdapat fasilitas tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimana evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel dan faktor penghambat dalam akses fasilitas khusus difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019.

4. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemberi sumber data kepada pengumpul data (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 2012). Data primer akan diperoleh dari pihak pertama, biasanya dilakukan dengan cara wawancara, jejak dan lain-lain (Arikunto, 2010). Jadi data primer adalah sumber data yang diberikan secara langsung dari pihak pertama melalui wawancara. Sumber data primer pada penelitian pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3

Sumber Data Primer

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Evaluasi Sarana dan Prasarana di Telaga Sarangan	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Wawancara
2	Pengembangan Wisata Telaga Sarangan	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Wawancara
3	Akses fasilitas difabel	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Wawancara
4	Indikator Keberhasilan Program	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Wawancara

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber mengenai evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel di telaga sarangan tahun 2019 dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan secara tidak langsung yang berasal dari buku, laporan, catatan ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata dan akses khusus difabel di telaga sarangan tahun 2019. Sumber data sekunder pada penelitian pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sumber Data Sekunder

No	Nama Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Kondisi Wilayah/ Demografi Telaga Sarangan Kabupaten Magetan	Data dari dinas pariwisata
2	Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Data dari dinas pariwisata
3	Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Data dari dinas pariwisata
4	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Data dari dinas pariwisata

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan berasal dari buku, jurnal dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen maupun laporan kinerja perkembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel di telaga sarangan tahun 2019.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menerangkan dengan berbagai cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan berbagai data yang mendukung dalam penelitiannya (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah *purposive sampling* karena peneliti

memilih informan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) dengan kepala dinas pariwisata Kabupaten Magetan dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong & J, 2014). Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan dalam rangka menggali informasi tentang mengenai evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel di telaga sarangan tahun 2019. Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman pertanyaan yang terstruktur sebelumnya. Data informan yang akan peneliti teliti, meliputi:

Tabel 1.5
Narasumber Wawancara

No	Instansi	Narasumber	Nama
1	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Joko Trihono, S.Sos, M.Si
2	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	Happy Herawati, ST, MM
3	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Seksi Pengolahan Daya Tarik, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata	Didik Kurniyawan, A.Md
4	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Seksi Usaha, Sarana dan Jasa Pariwisata	Citra Natalia Widiastami, SST.Par
5	Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan	Seksi Promosi dan Informasi Pariwisata	Rr. Edna Prastijo J, S.Sos
6	Masyarakat Difabel	Difabel yang Berwisata di Telaga Sarangan Magetan	Cahyo

Dengan begitu narasumber yang diwawancarai pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pariwisata, pengelola wisata Telaga Sarangan serta wisatawan lokal dan difabel.

Narasumber tersebut dipilih karena keberadaannya berkaitan langsung dengan evaluasi program pemerintah dalam pengembangan wisata melalui akses fasilitas difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan Tahun 2019. Narasumber tersebut juga memiliki informasi evaluasi program pemerintah dalam pengembangan wisata melalui akses fasilitas difabel di Telaga Sarangan pada tahun 2019

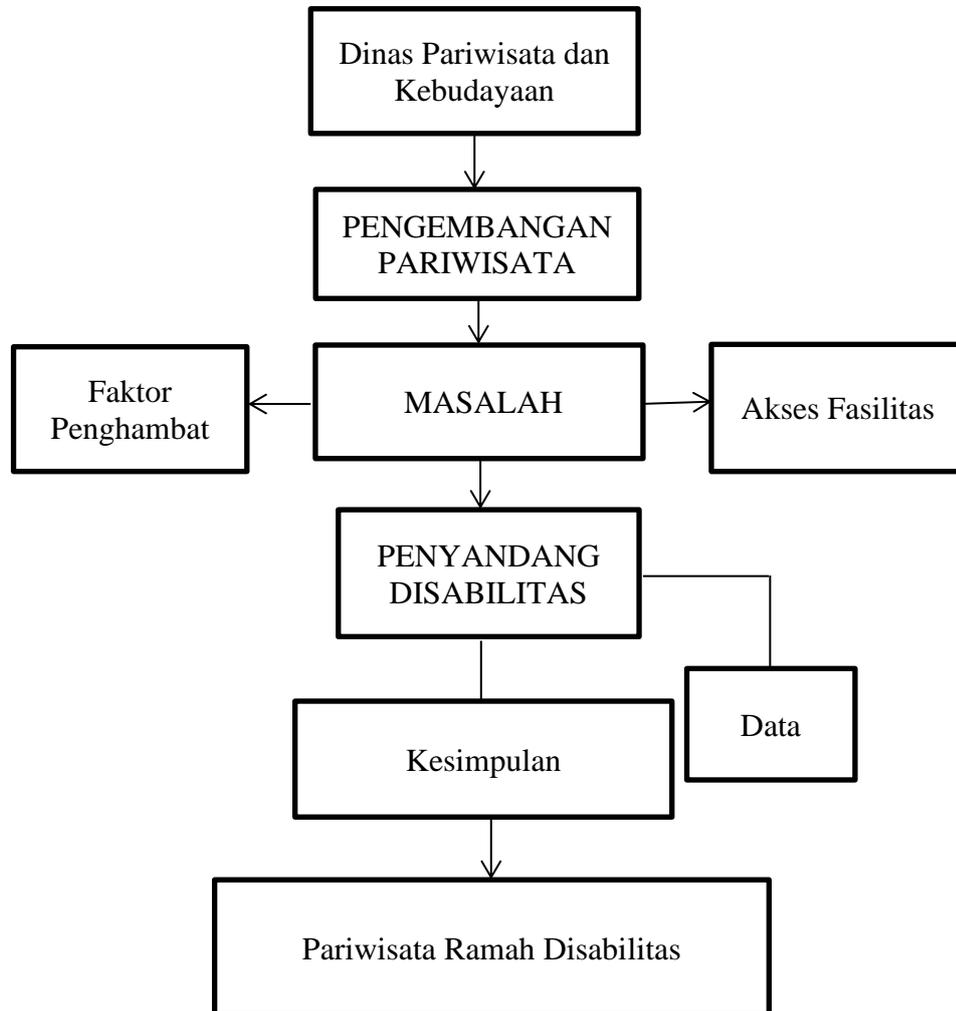
b. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu cara peneliti dalam mendapatkan sudut pandang objek yang akan diteliti baik melalui media tertulis dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang telah memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarkan kepada pemakai informasi tersebut. Peneliti memperoleh data dan dokumen-dokumen tertulis. Penulis membaca dan mempelajari berbagai tulisan dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet yang berkaitan dan mendukung kebenaran dan keabsahan dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

6. Teknis Analisis Data

Analisis Data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan di lapangan atau bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2014). Proses analisis data dapat dilakukan dengan pengumpulan data melalui pengamatan dari berbagai sumber di lapangan (Moleong & J, 2014).

Alur Penyajian Data



Keterangan :

Pada penelitian dimulai dari rumusan masalah tentang Bagaimana evaluasi pengembangan pariwisata dalam akses fasilitas khusus difabel di Telaga Sarangan Kabupaten Magetan tahun 2019. Proses Pengumpulan data diambil dari data primer melalui wawancara langsung dengan narasumber dan data sekunder dari dokumentasi dan laporan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan yang menjadi fokus yaitu Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata

pada tahun 2019 yang menjadi fokus pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan peneliti tentang faktor penghambat akses fasilitas bagi difabel di Telaga Sarangan pada tahun 2019 melalui hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat mengetahui faktor penghambat akses fasilitas bagi difabel sehingga dapat dikuatkan menjadi temuan baru yaitu wisata ramah disabilitas.